

---

**BENTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR BERKELANJUTAN  
DI KABUPATEN PEKALONGAN****Musaddun, Wakhidah Kurniawati, Santy Paulla Dewi dan Novia Sari Ristianti***Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro*

**Abstrak:** Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dengan panjang pantai 81.000 km dan terbentang di sepanjang wilayah pesisirnya yang mempunyai berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu dengan adanya beberapa potensi yang terdapat di kawasan pesisir tersebut, saat ini kawasan pesisir banyak yang dimanfaatkan sebagai aktivitas utama masyarakat. Begitu pula yang terjadi di kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan dimana mempunyai beberapa potensi wisata pesisir yang dapat dikembangkan. Namun dalam perkembangannya, timbul berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan kawasan pesisirnya. Permasalahan tersebut apabila tidak ditindaklanjuti akan mempengaruhi keberlanjutan dan keberadaan wisata pesisirnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan pengembangan wisata pesisir di Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan keberlanjutan kawasan pesisir berupa konsep pengembangan, kebijakan dan pengelolaan serta pembiayaan kawasan. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yang dilakukan dalam memetakan potensi dan masalah serta kondisi eksisting kawasan dalam menentukan arahan pengembangan wisata pesisir di Kabupaten Pekalongan melalui metode deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan kuantitatif yang dilakukan adalah dalam menentukan lokasi prioritas yang akan dikembangkan sebagai wisata pesisir di Kabupaten Pekalongan dengan melihat keberlanjutannya melalui metode scoring dan pembobotan.

**Kata Kunci :** pengembangan, wisata, pesisir

**Abstract:** Indonesia has a long coastline with long sandy beaches and stretches 81,000 km along the coastal areas that have the potential that can be harnessed for sustainable development. Therefore, the presence of several potential contained in the coastal areas, many coastal areas currently utilized as the primary activity of the community. Similarly, occurring in coastal areas and Pekalongan regency, which had some coastal tourism potential that can be developed. But in its development, a wide range of issues arise relating to the coastal region. These problems, if not acted upon and will affect the sustainability of coastal tourism destinations. Based on this, the study aims to provide guidance on the development of coastal tourism in the District and the City of Pekalongan in realizing sustainability of coastal areas such as concept development, policy and management and finance areas. The research approach used in this study is a quantitative and qualitative approach. Qualitative approach in this study were done in mapping the potential and problems as well as in determining the region eksisting kondisi arahan pengembangan coastal tourism in the District and the City of Pekalongan through descriptive analysis method. While the quantitative approach taken is to determine the location of which will be developed as a priority coastal tourism in Pekalongan to see sustainability through scoring and weighting methods.

**Keywords:** development, tourism, coastal

## PENDAHULUAN

Wilayah pesisir memiliki potensi lain berupa keunikan dan keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata sehingga aktivitas pariwisata pun dapat dikembangkan dan menghasilkan dampak positif dengan ikut meningkatkan perekonomian kawasan. Pengembangan pariwisata pesisir sendiri pada dasarnya difokuskan pada pemandangan, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing – masing daerah. Reaksi atas pengembangan pariwisata ini dapat berupa implikasi negatif berupa terdegradasinya lingkungan akibat eksploitasi sumber daya untuk aktivitas pariwisata, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan yang memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan (hidup) generasi penerus di waktu yang akan datang. Pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan juga dapat memberikan implikasi positif bagi kelestarian lingkungan pesisir.

Begitu pula yang terjadi di kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan dimana mempunyai beberapa potensi wisata pesisir yang dapat dikembangkan. Kawasan pesisir pantai tersebut menjadi kawasan unggulan pengembangan ekonomi yang mempunyai potensi ekonomi cepat tumbuh sehingga ditetapkan menjadi salah satu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Tengah yang meliputi Kota Pekalongan – Kabupaten Batang - Kabupaten Pekalongan (Petanglong). Potensi wisata pesisir menjadi daya tarik visual bagi Kabupaten Pekalongan yang dapat memberikan implikasi positif dalam pengembangan ekonomi dan mendukung fungsi perdagangan dan jasa bagi kota.

Kabupaten Pekalongan mempunyai beberapa potensi wisata pesisir yang meliputi potensi wisata alam berupa hamparan pantai dan laut seperti pantai Slamaran, pantai Pasir Kencana, pantai Wonokerto dan pantai Depok. Disamping itu, potensi wisata pesisir Kabupaten Pekalongan juga didukung dengan adanya potensi perikanan yang sangat

berlimpah dengan adanya tambak-tambak yang dikembangkan serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendukung aktivitas perdagangan bagi masyarakat dan nelayan sekitar. Hal tersebut dapat mendukung potensi perikanan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan, sehingga peluang usaha tersebut masih sangat luas untuk dikembangkan. Selain berpotensi untuk usaha pengembangannya juga dapat memberikan peluang investasi dalam usaha pengolahannya.

Namun dalam perkembangannya, timbul berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan kawasan pesisirnya. Permasalahan tersebut apabila tidak ditindaklanjuti akan mempengaruhi keberlanjutan dan keberadaan wisata pesisirnya. Pada dua dekade terakhir ini, erosi dan abrasi pantai telah menyebabkan kemunduran garis pantai di berbagai wilayah pantai yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir (Wahyudi, 2009). Berdasarkan data dari Balitbang Provinsi Jawa Tengah tahun 2004, menunjukkan bahwa tekanan abrasi di Kabupaten Pekalongan telah mencapai sebesar 24,145 Ha dengan laju 2,012 Ha/tahun kemudian disusul Kota Pekalongan sebesar 5,150 Ha dengan laju 0,49 Ha/tahun.

Terjadinya abrasi di Kabupaten Pekalongan tersebut salah satunya disebabkan karena hilangnya sabuk hijau pantai khususnya hutan mangrove yang ada di sekitarnya (Suara Merdeka, 2006). Hal tersebut akan berdampak secara langsung terhadap hilangnya tempat-tempat berpijah dan pemeliharaan ikan. Disamping itu, potensi wisata pesisirnya juga akan terganggu karena abrasi juga menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan menimbulkan rob di kawasan sekitar. Lebih lanjut hal tersebut akan menimbulkan dampak secara tidak langsung yang dapat mengancam rusaknya wilayah pesisir dimana ekosistem laut akan berkurang sehingga akan mempengaruhi hasil tangkapan dan pendapatan bagi masyarakat pesisir pantai Kabupaten Pekalongan yang beraktivitas di sekitarnya. Permasalahan tersebut apabila tidak segera ditangani akan

mempengaruhi sustainability coastal tourism khususnya berkaitan dengan hilangnya keberlanjutan pelestarian lingkungan kawasan pesisir yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat pesisir di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan tersebut, maka perlu adanya pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan dengan pengembangan wisata dengan konsep sustainable coastal tourism. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilihat mengenai isu-isu pengembangan wisata pesisir di Kabupaten Pekalongan sehingga pengembangan kawasan pesisir tetap menjadi salah satu sumber daya pariwisata alam yang dapat menciptakan keberlanjutan dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial.

## KAJIAN LITERATUR

### *Pengertian Pariwisata Pesisir Berkelanjutan*

Konsep pariwisata pesisir berkelanjutan (*sustainable coastal tourism*) adalah pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan maupun daerah tujuan wisata pada masa kini, sekaligus melindungi dan mendorong kesempatan serupa dimasa yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan mengarah pada pengelolaan seluruh sumberdaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, estetika dapat terpenuhi sekaligus memelihara integritas kultural, proses ekologi essensial keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan (WTO 1980).

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: Km. 67/Um.001/Mkp/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata menyatakan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan saat ini dengan tetap menjaga dan meningkatkan kesempatan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dicitrakan menjadi patokan dalam pengaturan sumberdaya sehingga kebutuhan ekonomi,

sosial dan estetika tercapai, dengan tetap menjaga integritas budaya proses-proses dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya pariwisata berkelanjutan dapat dicapai bila pertumbuhan yang selaras antara ekologi, ekonomi dan sosial serta instansi-instansi yang terkait.

*Commonwealth Coastal Action Program* (1997) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable coastal tourism*) adalah pengembangan pariwisata yang memperhatikan wilayah konservasi dan perubahan komunitas ekologi yang ditimbulkannya, meliputi perlindungan terhadap satwa liar dan menjaga kualitas kehidupan yang ada di lingkungan tersebut untuk generasi yang akan datang. Jadi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan keramahan lingkungan di sekitarnya.

### *Prinsip-Prinsip Pariwisata Pesisir Berkelanjutan*

#### **1. Prinsip Keseimbangan**

Pengelolaan pariwisata harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi.

#### **2. Prinsip Partisipasi Masyarakat**

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata.

#### **3. Prinsip Konservasi**

Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Pengembangan harus diselenggarakan secara bertanggung jawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.

#### **4. Prinsip Keterpaduan**

Pengelolaan memperhatikan kondisi ekosistem dan disinerjikan dengan pembangunan berbagai sektor.

#### **5. Prinsip Penegakan Hukum**

Pengelolaan pariwisata harus dikembangkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada,serta dilaksanakan dengan penegakan hukum maupun peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pariwisata.

*Indikator Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan*

**TABEL I**  
**INDIKATOR SUSTAINABLE COASTAL TOURISM**

INDIKATOR <i>Sustainable Coastal Tourism (SCT)</i>	KETERANGAN
1. Konservasi kawasan yang mampu melindungi dan memelihara ekosistem wisata pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola sumber daya perikanan dan kelautan tanpa merusak atau membahayakan ekosistem</li> <li>• Melestarikan hutan mangrove sebagai sabuk hijau kawasan pesisir untuk mencegah abrasi</li> <li>• Mengelola kualitas dan kuantitas air yang baik yang dapat mempertahankan jumlah dan jenis biota perairan</li> <li>• Keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kawasan pesisir</li> </ul>
2. Pemberdayaan masyarakat terhadap kontribusi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi wisata pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dan menciptakan lapangan pekerjaan sesuai potensi pesisir yang mampu memberikan penghasilan yang kontinyu (tidak musiman)</li> <li>• Mendorong berkembangnya usaha perdagangan dan jasa pendukung aktivitas wisata pesisir lainnya</li> <li>• Membantu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat seperti pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan wisata pesisir</li> <li>• Menanamkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir</li> <li>• Mengembangkan atraksi budaya setempat sebagai daya tarik wisata</li> <li>• Melestarikan nilai-nilai adat/tradisi masyarakat pesisir</li> </ul>
3. Peningkatan jumlah pengunjung dilokasi wisata pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keindahan panorama pesisir pantai sebagai embrio atraksi wisata alam.</li> <li>• Kondisi fisik pantai yang menunjang kegiatan pengunjung dalam berwisata</li> <li>• Terdapat fasilitas ekonomi yang mendukung daya tarik wisata</li> </ul>
4. Kebudayaan masyarakat lokal yang kuat dan berkesinambungan sebagai daya tarik pengunjung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kebudayaan setempat yang dilaksanakan secara berkala sebagai daya tarik pengunjung.</li> <li>• Terdapat kehidupan khas bernelayan.</li> </ul>

Sumber : Analisis Peneliti Lab. Rancang T. PWK UNDIP, 2013

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yang dilakukan dalam memetakan potensi dan masalah serta kondisi eksiting kawasan dalam menentukan arahahan pengembangan wisata pesisir di Kabupaten Pekalongan melalui metode deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan kuantitatif yang dilakukan adalah dalam menentukan lokasi prioritas yang akan dikembangkan sebagai wisata pesisir di Kabupaten Pekalongan dengan melihat keberlanjutannya melalui metode scoring dan pembobotan.

Analisis yang digunakan antara lain:

1. **Analisis Pemilihan Lokasi Pengembangan *Sustainable Coastal Tourism*.** Berisi tentang pemilihan lokasi prioritas pada wisata pesisir di Kabupaten Pekalongan yang cocok dikembangkan sebagai *Sustainable Coastal Tourism*.
2. **Analisis Pemetaan Potensi dan Permasalahan pada Lokasi Pengembangan *Sustainable Coastal Tourism*.** Berisi tentang penggalian potensi dan permasalahan terkait dengan pengembangan *Sustainable Coastal*

*Tourism* di lokasi terpilih dengan melihat faktor secara fisik dan non fisik. Fisik berupa sarana prasarana penunjang pengembangan wisata sedangkan non fisik berupa kelembagaan dalam pengembangan wisata.

3. **Analisis Kebijakan Pengembangan Sustainable Coastal Tourism.** Berisi tentang penggalan kebijakan-kebijakan pengembangan wisata pesisir pada lokasi terpilih dengan melihat RIPP (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata) di Kabupaten Pekalongan. Hal-hal yang akan dicermati adalah terkait dengan kebijakan pengaturan fisik dan non fisik lokasi terpilih dengan melihat indikator keberhasilan pengembangan wisata pesisir yang berkelanjutan.
4. **Analisis Bentuk Pengembangan Sustainable Coastal Tourism.** Berisi tentang melihat secara rinci hasil dari analisis kebijakan pengembangan wisata

pesisir berkelanjutan di lokasi terpilih kemudian diberikan rekomendasi bentuk pengembangan *Sustainable Coastal Tourism* di lokasi terpilih baik secara fisik maupun secara non fisik.

#### HASIL PEMBAHASAN

Pemilihan lokasi prioritas pengembangan *Sustainable Coastal Tourism* dilakukan secara kuantitatif melalui *skoring* pada lokasi – lokasi wisata di Kabupaten Pekalongan. *Skroring* dilakukan dengan melakukan penilaian lokasi – lokasi wisata di Kabupaten Pekalongan berdasarkan indikator *Sustainable Coastal Tourism* dan potensi serta permasalahan yang ada di lokasi wisata pesisir Kabupaten Pekalongan. Untuk lebih jelasnya, hasil skoring lokasi dapat dilihat pada **tabel 2**.

Berdasarkan hasil skoring di atas, maka lokasi prioritas pengembangan *Sustainable Coastal Tourism* yang terpilih adalah Wisata Pesisir Wonokerto.

**TABEL II**  
**SKORING LOKASI WISATA PESISIR PEKALONGAN**

No.	INDIKATOR		LOKASI	
			Wisata Pesisir Wonokerto	Wisata Pesisir Depok
1.	Sektor Lingkungan	Konservasi kawasan yang mampu melindungi dan memelihara ekosistem wisata pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kawasan hutan mangrove sebagai daerah pemijahan jenis ikan dan menambah keindahan panorama pesisir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak terdapat pohon mangrove di pematang-pematang tanah dan saluran air</li> </ul>
<b>SKOR</b>			<b>3</b>	<b>2</b>
2.	Sektor Ekonomi	Pemberdayaan masyarakat terhadap kontribusi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi wisata pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata pesisir belum berkontribusi besar</li> <li>• Terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan dan Pertanian sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.</li> <li>• Masyarakat yang ada memiliki nilai-nilai adat/tradisi masyarakat pesisir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaannya</li> <li>• Masyarakat yang ada lebih peduli terhadap perkembangan kawasan.</li> </ul>

No.	INDIKATOR		LOKASI	
			Wisata Pesisir Wonokerto	Wisata Pesisir Depok
SKOR			3	2
3.	Sektor Ekonomi	Peningkatan jumlah pengunjung dilokasi wisata pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai pesisir pantai landai dan berpasir dengan lebar pantai <math>\pm</math> 50 m sampai dengan 200 m, yang menjadi daya tarik wisatawan</li> <li>Adanya areal pertambakan yang mempunyai potensi perikanan laut dan terdapat 2 buah TPI yang cukup besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat budidaya perikanan tambak yang memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar</li> <li>Memiliki pesisir pantai dengan sederetan pohon nyiur yang menjadi daya pemikat yang utama</li> </ul>
SKOR			2	1
4.	Sektor Sosial	Kebudayaan masyarakat lokal yang kuat dan berkesinambungan sebagai daya tarik pengunjung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya upacara sedekah laut (nyadran) yang dikombinasikan dengan budaya tradisional lainnya seperti pementasan wayang kulit, gamelan, maupun tari-tarian tradisional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat kebudayaan khusus pada kawasan wisata.</li> </ul>
SKOR			3	1
TOTAL SKOR			11	6

Sumber : Hasil Analisis, 2013. Keterangan tabel : 1 = buruk; 2 = sedang; 3 = baik

Kawasan wisata pantai Wonokerto memiliki potensi secara fisik berupa adanya kampung nelayan dan TPI yang dapat menjadi pusat aktivitas perekonomian masyarakat serta kondisi pantainya yang landai sehingga dapat mendukung pengembangan aktivitas tersebut. Keberadaan areal pertambakan dan dermaga kapal juga dapat ikut mendukung pengembangan aktivitas pariwisata di Kawasan Pantai Wonokerto sehingga dapat tercipta sebuah kawasan wisata yang memiliki atraksi yang beragam.

Sedangkan permasalahan yang terdapat di Kawasan Wisata Pesisir Pantai Wonokerto adalah belum terakomodasi dengan baikny akebutuhan pengunjung seperti keberadaan sarana prasarana yang baik dan tidak adanya fasilitas umum pendukung yang dapat menunjang aktivitas pariwisata pengunjung.

Berdasarkan potensi dan permasalahan pengembangan Pantai Wonokerto maka bentuk pengembangan *Sustainable Coastal Tourism* secara fisik di Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto adalah sebagai berikut :

#### a. Atraksi

Salah satu bentuk pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan adalah pendekatan pengembangan sarana dan prasarana. Sehingga dalam pengembangan kawasan wisata pesisir Pantai Wonokerto, Desa Wonokerto Kulon dan Desa Tratebang dalam menunjang atraksi yang ada harus tetap memerlukan sarana dan prasana guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

**b. Wisatawan**

Untuk mendatangkan wisatawan pada kawasan wisata maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas berwisata pada wisatawan. Dalam kawasan pesisir Pantai Wonokerto, Desa Wonokerto Kulon dan Desa Tratebang untuk menungjang para wisatawan masih sangat minim sedangkan dilihat dari kondisi eksisting ada pada kawasan pesisir Pantai Wonokerto, Desa Wonokerto Kulon dan Desa Tratebang pengunjung/wisatawan yang datang bisa dikatakan ramai pengunjung, terutama pada hari jum'at sore dan hari minggu pagi dimana para wisatawan datang dalam rangka berlibur.

**c. Aksesibilitas dan Transportasi**

Kondisi aksesibilitas Pantai Wonokerto dari segi jarak dan waktu masih kurang mendukung pariwisata yang ada padahal untuk menciptakan sebuah lokasi wiata yang berkelanjutan diperlukan aksesibilitas yang terjaga dengan baik kondisinya. salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengaplikasi konsep *carrying capacity* yang di ambil dari teori teori pemanfaatan lingkungan alam secara berkelanjutan yaitu dengan:

- Menentukan jumlah perahu yang ideal agar tidak melebihi daya tampung perairan pariwisata bahari Pantai Wonokerto.
- Mengatur dan memanfaatkan akses jalan umum sebaiknya tanpa merugikan pihak lain.
- Menentukan daya tampung parkir yang dapat di toleransi.
- Manajemen aksesibilitas tidak boleh di tentukan oleh salah satu pihak, pemerintah yang berhak mengatur dan membuat peraturan.

**d. Promosi dan Informasi**

Media promosi dan informasi merupakan salah satu elemen yang diperlukan untuk menunjang keberlanjutan sebuah lokasi wisata. Pada kawasan wisata pantai wonokerto, media promosi dan informasi yang ada belum terlalu memadai sehingga dibutuhkan peningkatan jumlah media tersebut untuk memperkenalkan pantai

wonokerto sebagai sebuah kawasan wisata.

**e. Pelayanan**

Kepariwisataan pantai Wonokerto tidak akan pernah maju seperti sekarang bila tanpa adanya fasilitas-fasilitas yang memberikan rasa nyaman kepada wisatawan. Fasilitas yang ada yaitu:

- Fasilitas utama wisata bahari seperti usaha-usaha tirta, kelompok nelayan, persatuan pencinta olahraga pantai, live guard, non government organization, yang semua ini berperan aktif dalam kegiatan pariwisata bahari Wonokerto.
- Fasilitas umum (public facility) dalam penelitian ini seperti: kamar mandi umum, ruang ganti dan shower, tempat sampah, parkir, alat komunikasi, papan-papan informasi dan pengaturan.
- Fasilitas penunjang wisata bahari yaitu usaha-usaha yang menawarkan produk ataupun jasa non wisata bahari yang ada di sekitaran pantai Wonokerto seperti: Hotel, restoran, bar, mini market, art shop, jasa pijat, warung-warung non permanen dan pedagang kaki lima.

Fasilitas-fasilitas bahari ini wajib untuk dikelola agar tidak mengganggu atau pun merusak SDA dan kegiatan wisata bahari pantai Wonokerto serta mengurangi gesekan berbagai macam kepentingan, semua ini perlu ditangani oleh pemerintah secara serius. Bila dilihat dari keadaan kunjungan wisatawan sangat perlu pemerintah mencanangkan program pantai Wonokerto bebas dari sampah dan permasalahan lainnya.

Pengembangan pariwisata pesisir pantai Wonokerto merupakan suatu usaha yang sangat kompleks yang melibatkan banyak sektor. Sehingga dalam penentuan pengelola kelembagaannya harus melibatkan berbagai pihak/stakeholder.

**KESIMPULAN & REKOMENDASI*****Kesimpulan***

*Sustainable Coastal Tourism* merupakan konsep pengembangan pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan

maupun daerah tujuan wisata pada masa kini, sekaligus melindungi dan mendorong kesempatan serupa dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan potensi kawasan pesisir yang memiliki karakteristik yang unik dan sumber daya alam yang berlimpah.

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki kawasan pesisir dengan potensi pariwisata yang cukup besar. Kawasan Pesisir Kabupaten Pekalongan terletak di tiga kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 17 Tahun 2009 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan, ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Tirto.

Wisata Pesisir yang ada di Kawasan Pesisir Kabupaten Pekalongan adalah Pantai Wonokerto dan Pantai Depok yang terdapat di Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Siwalan. Permasalahan yang terjadi di Wisata Pesisir Pantai Wonokerto dan Depok secara fisik adalah tidak tersedia dengan baiknya sarana prasana di Kawasan Pantai mulai dari kondisi jalan yang rusak dan terbatasnya tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Permasalahan secara kelembagaan adalah kurang tertatanya sistem pengelolaan wisata pesisir seperti pantai dan pantai depok oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan hasil skoring yang telah dilakukan, maka lokasi prioritas pengemabangan *Sustainable Coastal Tourism* adalah Wisata Pantai Wonokerto. Luas lokasi prioritas ini adalah 71 Ha, terletak di Kecamatan Wonokerto dan meliputi Desa Wonokerto Kulon, Desa Api – Api, Desa Tratebang, Desa Semut, Desa Wonokerto Wetan dan Desa Pecakaran.

### **Rekomendasi**

#### **a. Rekomendasi untuk Masyarakat**

Pengembangan wisata yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya, untuk itu masyarakat yang berada di Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto dapat ikut

menjaga kelestarian pantai. Kawasan pesisir Pantai Wonokerto juga memiliki kampung nelayan dimana keberadaan kampung nelayan tersebut juga didukung oleh aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan bernelayan. Aktivitas-aktivitas tersebut akan menjadi daya tarik pengembangan kampung wisata nelayan yang dapat menarik pengunjung untuk datang dan melihat aktivitas nelayan di kampung tersebut. Sehingga masyarakat kampung nelayan juga dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Pantai Wonokerto dengan mempertahankan tradisi dan budaya kampung nelayan yang menjadi aktivitas utama selama ini. Kemudian dalam pelaksanaannya, masyarakat juga dianjurkan untuk ikut melindungi ekosistem mangrove yang ada dengan tidak menebangi mangrove dan merubahnya menjadi areal pertambakan, agar kondisi pantai dapat tetap terjaga dan menghindari laju abrasi di kawasan wisata pantai.

#### **b. Rekomendasi untuk Pemerintah**

Pengembangan wisata pesisir yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi dari beberapa stakeholder, baik itu masyarakat, pihak swasta ataupun lembaga masyarakat. Banyaknya stakeholder yang terlibat seharusnya tidak membuat pemerintah daerah melakukan pengelolaan secara otoriter. Meskipun sebagai stakeholder yang mempunyai otoritas terhadap pengelolaan kawasan pesisir, seyogyanya dalam pelaksanaan pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait. Agar pengelolaan pariwisata pesisir dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan setidaknya ada dua opsi pengelolaan yang ditawarkan, yaitu : pertama, Kemitraan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dengan stakeholder dan kedua, Badan Layanan Usaha Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah dan stakeholder.

### 1. **Kemitraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pariwisata dengan stakeholder**

Unit Pelaksana Teknis merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pariwisata pesisir di pantai Wonokerto, namun dalam pelaksanaannya pengelolaannya melakukan kemitraan dengan berbagai pihak/stakeholder. Kemitraan disini dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan stakeholder terhadap pariwisata dan juga sebagai rekan kerja dalam pengelolaan pariwisata pesisir. Keterlibatan para pihak dapat diakomodir dalam bentuk forum/mitra pariwisata.

### 2. **Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)**

Badan Layanan Usaha Daerah merupakan organisasi yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, karena dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS atau pihak lain yang terlibat dalam kepariwisataan di pesisir pantai Wonokerto dengan diberi renumerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme

## DAFTAR PUSTAKA

- American Heritage Dictionary. 2012. *Definition, 50, Backlinks to repository.usu.ac.id, 6, 2012-12-13.*
- Budiharsono S., 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan.* Pradnya Paramita: Jakarta.
- Brundtland Report. 1987. *Our Common Future.* Oxford University Press, Oxford.
- Creswell, John W.. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and. Mixed Method Approaches.* London: Sage Publications.
- Damanik, J dan Weber,H.F. 2006. *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke. Aplikasi.* Penerbit Andi. Yogyakarta. Drumm, A dan Moore, A.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2002. *Pedoman Umum Kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan.* Direktorat Pemasaran Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Dahuri, Rokhmin. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Iqbal, Hasan. 2002. *Metode penelitian dan aplikasinya.* Cetakan pertama. Jakarta. : Ghalia Indonesia.
- Johannes, H., Diposaptono, Sugianto. 2011. *Strategi Adaptasi Dan Mitigasi Bencana Pesisir Akibat Perubahan Iklim Terhadap Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.*
- Kementerian Kehutanan Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I. 2011.
- Kompas. 2012. [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- Moleong, L J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT.Remaja.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 2013.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei.* LP3S, Jakarta.
- Siti Nurisyah. 1998. *Rencana pengembangan Fisik Kawasan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir Indonesia.* Bulletin Taman dan Lanskap Indonesia. Perencanaan, Perancangan dan Pengelolaan. Volume 3, Nomor 2, 2000.
- Soegiarto A. 1976. *Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir.* Lembaga Oseanologi Nasional, Yakarta.
- Soemarwoto, Otto. 1987. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan.* Jakarta :Djambatan.
- Sons, Inc. Kusmayadi, Endar Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang. Kepariwisataan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sorensen JC, Mc Creary. 1990. *Coastal: Institutional Arrangements for Management of Coastal Resources.* Berkeley: University of California of Berkeley.

Splillane, J.J. 1987. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.

Suara Merdeka. 2006. [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)

Supriharyono, 2007. *Konservasi Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir Tropis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Yoeti, Oka A. 1985. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.